



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT



www.sawahluntokota.go.id

**PERATURAN WALIKOTA
SAWAHLUNTO
NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Pembinaan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903 - 975 - 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
25. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dalam tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp617.114.731.717,00 (enam ratus tujuh belas miliar seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp64.812.610.293,00 (enam puluh empat miliar delapan ratus dua belas juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.025.500.000,00 (tujuh miliar dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.366.610.293,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15.150.000.000,00 (lima belas miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.270.500.000,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.025.500.000,00 (tujuh miliar dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima

juta rupiah).

- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp816.500.000,00 (delapan ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (8) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
- (9) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp5.366.610.293,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.716.910.293,00 (satu miliar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.544.300.000,00 (tiga miliar lima ratus

empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.400.000,00 (seratus lima juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp 15.150.000.000,00 (lima belas miliar seratus lima puluh juta rupiah) yakni Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp 37.270.500.000,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - h. pendapatan dari pengembalian;
 - i. pendapatan BLUD;
 - j. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan
 - k. kesehatan nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan
 - l. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp548.428.802.834,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

- b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp523.263.794.498,00 (lima ratus dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.165.008.336,00 (dua puluh lima miliar seratus enam puluh lima juta delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 10

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp3.873.318.590,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dari pendapatan hibah.

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 674.249.264.407,00 (enam ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp498.384.910.992,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan

- e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 265.948.581.039,00 (dua ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp211.745.210.829,00 (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.890.474.124,00 (empat belas miliar delapan ratus sembilan puluh empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.550.645.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp265.948.581.039 (dua ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala daerah/wakil kepala daerah; dan
 - g. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp156.284.456.962,00

(seratus lima puluh enam miliar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 53.128.216.613,00 (lima puluh tiga miliar seratus dua puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.130.809.539,00 (tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.772.853.622,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp273.840.623,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.847.523.680,00 (lima belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp211.745.210.829,00 (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;

- c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.003.899.407,00 (lima puluh satu miliar tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.527.423.145,00 (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.291.930.869,00 (Dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.496.731.088,00 (dua puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.622.750.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa Belanja Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.802.476.320,00 (dua belas miliar delapan ratus dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Pasal 15

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yaitu belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang.

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) direncanakan sebesar Rp14.890.474.124,00 (empat belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh empat rupiah) , yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.521.710.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.784.100.000,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp584.664.124,00 (lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf e direncanakan sebesar Rp4.550.645.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) yaitu belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp114.637.166.815,00 (seratus empat belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.

- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.875.862.224,00 (enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.090.561.912,00 (tiga puluh satu miliar sembilan puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 66.566.542.679,00 (enam puluh enam miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp104.200.000,00 (seratus empat juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 19

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp3.818.738.600,00 (tiga miliar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yakni belanja tidak terduga.

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp57.408.448.000,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.239.217.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.169.231.000,00 (lima puluh enam miliar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 21

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp58.801.199.359,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 22

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp46.715.232.575,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

(2) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.715.232.575,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), dari penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan.

(3) Anggaran penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.085.966.784,00 (dua belas miliar delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), yaitu penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat.

Pasal 23

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp1.666.666.669,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan;
- b. pemberian pinjaman.

- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.166.666.669,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 57.134.532.690,00 (lima puluh tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 57.134.532.690 (lima puluh tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 25

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian ObjekPendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

Pasal 26

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto

pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA SAWAHLUNTO

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto

pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR 91



DAFTAR ISI
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

	Halaman
LAMPIRAN I : RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022	1
LAMPIRAN II : RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022	
1. Dinas Pendidikan	21
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	35
3. RSUD	63
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68
5. Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan LH	85
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	103
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	110
8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	129
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	148
10. Dinas Perhubungan,	156
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	164
12. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	175
13. Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	185
14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	196
15. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	205
16. Sekretariat Daerah	217
17. Sekretariat DPRD	236
18. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	246
19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	258
20. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	275
21. Inspektorat	283
22. Kecamatan Barangin	289
23. Kecamatan Lembah Segar	299
24. Kecamatan Silungkang	310
25. Kecamatan Talawi	317
26. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah	325
LAMPIRAN III : DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH	336
LAMPIRAN IV : DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN HIBAH	342
LAMPIRAN V : DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN	367
LAMPIRAN VI : DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL	369
LAMPIRAN VII : RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	371
LAMPIRAN VIII : RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM / TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI, MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	372
LAMPIRAN IX : RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	373
LAMPIRAN X : SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PADA DAERAH PERBATASAN DALAM RANCANGAN PERDA TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERKADA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA	374

KOTA SAWAHLUNTO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	64.812.610,293
4.1.01	Pajak Daerah	7.025.500,000
4.1.01.06	Pajak Hotel	155.000,000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	155.000,000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	155.000,000
4.1.01.07	Pajak Restoran	816.500,000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	684.000,000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	684.000,000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	72.500,000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	72.500,000
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	18.000,000
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	18.000,000
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	22.000,000
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	22.000,000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	20.000,000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	20.000,000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	116.000,000
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	500,000
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	500,000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	500,000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	500,000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	15.000,000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	15.000,000
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	100.000,000
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	100.000,000
4.1.01.09	Pajak Reklame	38.000,000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	35.000,000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	35.000,000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	3.000,000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	3.000,000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	3.500.000,000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.500.000,000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.500.000,000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000,000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	100.000,000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	100.000,000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.500.000,000
4.1.01.15.01	PBBP2	1.500.000,000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.500.000,000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	800.000,000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	800.000,000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	800.000,000
4.1.02	Retribusi Daerah	5.366.610,293

KOTA SAWAHLUNTO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.716.910.293
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	395.270.293
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	395.270.293
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	138.500.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	138.500.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	171.200.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	171.200.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	813.740.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	813.740.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	48.200.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	48.200.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.544.300.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.709.700.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	462.100.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	503.000.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	10.000.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	722.600.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	12.000.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	23.000.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	23.000.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	65.000.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	65.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.746.600.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.746.600.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	105.400.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	400.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	400.000
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	105.000.000
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	105.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.150.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	15.100.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	15.100.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	15.100.000.000
4.1.03.03	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	50.000.000
4.1.03.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	50.000.000
4.1.03.03.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	50.000.000

KOTA SAWAHLUNTO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	37.270.500.000
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	837.500.000
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	720.000.000
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	720.000.000
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	117.500.000
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	117.500.000
4.1.04.05	Jasa Giro	650.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	450.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	450.000.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	200.000.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	200.000.000
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	5.000.000
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	5.000.000
4.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	5.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	5.500.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.500.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.500.000.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	600.000.000
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	600.000.000
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	600.000.000
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	510.000.000
4.1.04.14.01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	510.000.000
4.1.04.14.01.0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	510.000.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	51.000.000
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	46.000.000
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	46.000.000
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	5.000.000
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	5.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	29.000.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	29.000.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	29.000.000.000
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	67.000.000
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	67.000.000
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	67.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	548.428.802.834
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	523.263.794.498
4.2.01.01	Dana Perimbangan	498.120.946.498
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	19.310.829.498
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.813.398.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	3.788.866.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	74.721.498

KOTA SAWAHLUNTO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	611.935.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	6.973.824.000
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	129.259.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	341.393.550.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	341.393.550.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	88.905.642.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	439.590.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	7.538.615.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.079.024.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	1.205.802.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2.767.794.000
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	437.395.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.612.825.000
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	164.248.000
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	1.614.845.000
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	24.133.490.000
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	11.684.578.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	19.207.429.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	6.074.421.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	4.263.099.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	3.795.767.000
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.156.050.000
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	730.670.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	48.510.925.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	8.430.900.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	360.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	25.111.714.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	378.000.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.575.600.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	175.300.000
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	2.300.000.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.680.342.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	3.634.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.272.823.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	3.085.044.000
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	837.673.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	369.695.000
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	601.800.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	328.400.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	5.044.116.000
4.2.01.02.01	DID	5.044.116.000
4.2.01.02.01.0001	DID	5.044.116.000

KOTA SAWAHLUNTO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.05	Dana Desa	20.098.732.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	20.098.732.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	20.098.732.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.165.008.336
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	25.165.008.336
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	25.165.008.336
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	25.165.008.336
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.873.318.590
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.873.318.590
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	3.873.318.590
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	3.873.318.590
4.3.03.02.01.0002	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	3.873.318.590
	Jumlah Pendapatan	617.114.731.717
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	498.384.910.992
5.1.01	Belanja Pegawai	265.948.581.039
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	156.284.456.962
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	110.843.143.349
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	109.826.004.866
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.017.138.483
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	12.320.262.052
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12.154.459.019
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	165.803.033
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.104.607.475
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.099.607.475
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	5.000.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.736.564.444
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.674.220.444
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	62.344.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.874.563.743
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.869.563.743
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.000.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	7.152.736.722
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	7.041.999.357
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	110.737.365
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	441.127.448
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	428.127.448
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	13.000.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.171.993
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.088.493
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	83.500
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	7.615.518.196
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	7.572.427.575

KOTA SAWAHLUNTO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	43.090.621
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	336.651.404
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	334.287.358
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.364.046
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	917.351.175
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	910.480.921
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	6.870.254
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	934.758.961
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	933.046.961
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1.712.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	53.128.216.613
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	47.086.994.504
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	47.003.834.504
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	83.160.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.049.240.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.049.240.000
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.712.500.000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.712.500.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	279.482.109
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	279.482.109
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	31.130.809.539
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	190.931.000
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	5.836.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	21.143.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	677.200
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	1.332.800
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	116.200.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	332.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	20.110.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	25.300.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	212.095.439
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	48.629.319
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	5.403.350
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.797.420
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	27.425.274
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	4.752.500
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	1.895.220
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	52.536.280
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	922.300

KOTA SAWAHLUNTO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.547.420
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	59.959.800
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	4.210.500
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	16.056
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	25.111.714.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	25.111.714.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	378.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	378.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.641.765.100
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.481.957.100
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	159.808.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	596.304.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	78.600.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	517.704.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.772.853.622
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	36.338.400
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	36.338.400
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	54.749.520
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	54.749.520
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	45.129.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	45.129.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	75.881.400
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	75.881.400
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	12.149.550
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	12.149.550
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.638.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.638.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	982.912
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	982.912
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.654.012.340
5.1.01.04.12.0001	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	255.679.956
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.083.096
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.249.288
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.394.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.762.500.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.762.500.000

KOTA SAWAHLUNTO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	9.450.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	9.450.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	273.840.623
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.765.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.765.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.616.196
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.616.196
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.537.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.537.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.196.132
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.196.132
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.877.228
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.877.228
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.000
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.000
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	22.419.996
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	22.419.996
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	864.000
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	864.000
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.080.000
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.080.000
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	45.658.800
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1.116.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	5.202.000
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	835.200
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	273.600
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	25.200.000
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	72.000
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	7.920.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5.040.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	35.821.271
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	2.587.223
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	745.200
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	786.240
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	5.606.928
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	180.000
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku	275.040
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	12.654.720

KOTA SAWAHLUNTO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	165.600
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	390.240
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	11.671.200
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	756.000
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.880
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	15.847.523.680
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	15.847.523.680
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	15.847.523.680
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.738.410.829
5.1.02.01	Belanja Barang	50.997.705.007
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	50.997.705.007
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	269.042.150
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	166.858.970
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.122.242.053
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	15.662.350
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	169.087.250
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	26.450.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	55.598.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.539.996.346
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	32.470.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	23.650.000
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	900.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	5.660.000
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	3.245.550
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	34.709.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.715.384.438
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	777.619.100
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.649.455.750
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	147.840.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.342.284.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.260.755.996
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	457.106.338
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	330.250.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	24.150.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	580.680.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	390.728.250

KOTA SAWAHLUNTO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	919.393.469
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	188.790.872
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	12.746.272.625
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	1.579.184.400
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	30.000.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.311.659.100
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	343.251.500
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	20.900.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.662.218.500
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.005.813.000
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	323.258.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	127.492.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.728.249.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	179.150.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	195.000.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	1.500.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	20.000.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	239.076.500
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	12.750.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	576.830.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	331.950.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	208.220.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	104.920.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	97.526.817.545
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	64.762.970.134
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	302.400.000
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	62.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.826.200.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	562.800.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.328.600.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	2.500.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	679.200.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.284.300.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.581.506.200
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	70.515.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	391.500.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.903.200.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	591.900.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	68.000.000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	71.700.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	899.400.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	305.305.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	716.400.000

KOTA SAWAHLUNTO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19.102.480.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	38.400.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.574.059.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	762.900.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.018.840.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.178.845.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	129.600.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	198.870.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	1.125.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	504.400.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	4.020.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	304.950.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	5.458.568
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	25.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	476.800.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	54.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	7.150.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	42.808.400
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	95.250.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	39.000.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	33.350.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	16.500.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	554.500.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	807.526.800
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.500.037.296
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	961.410.350
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.556.210.620
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	43.322.700
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	172.350.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	420.349.000
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	41.906.200
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	366.660.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	59.500.000
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	17.565.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.164.069.540
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	327.505.140
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	8.278.956.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	785.979.600
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	484.623.300
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	125.598.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	161.407.500
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	266.250.020
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	266.250.020
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.404.407.000

KOTA SAWAHLUNTO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.04.0010	Belanja Sewa Alat Pengangkat	750.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	373.900.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	566.957.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	203.800.000
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	180.000.000
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	79.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	727.950.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	419.000.000
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.500.000
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	69.450.000
5.1.02.02.05.0039	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan II	9.000.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	225.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	16.571.914.833
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	12.639.572.431
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	908.378.510
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	699.959.580
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.555.160.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	336.019.312
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	106.885.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	55.940.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	100.000.000
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	170.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.174.563.550
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	98.563.550
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	40.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.036.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	40.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	40.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.315.605.400
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	680.660.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.612.820.400
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	22.125.000
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	80.873.124
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1.488.000
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	9.780.000
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.113.600
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	364.800
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	33.600.000
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	96.000
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	28.970.724

KOTA SAWAHLUNTO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5.460.000
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	18.213.944
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.110.808
5.1.02.02.14.0004	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	262.080
5.1.02.02.14.0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1.868.976
5.1.02.02.14.0006	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	60.000
5.1.02.02.14.0009	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	91.680
5.1.02.02.14.0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	8.841.360
5.1.02.02.14.0018	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	5.520
5.1.02.02.14.0020	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.030.080
5.1.02.02.14.0022	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.690.480
5.1.02.02.14.0025	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	252.000
5.1.02.02.14.0027	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	960
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	24.291.930.869
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.875.150.625
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	21.659.825
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	175.752.900
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	106.761.400
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	12.800.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	74.838.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	7.500.000
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	15.955.500
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.902.980.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	29.400.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	20.000.000
5.1.02.03.02.0066	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las	6.184.650
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	6.800.000
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	2.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	115.700.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	36.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	233.390.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.700.000

KOTA SAWAHLUNTO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	8.500.000
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	1.280.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	38.400.000
5.1.02.03.02.0140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	12.000.000
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	74.347.350
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	166.590.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan, Komputer-Peralatan Personal Computer	173.550.000
5.1.02.03.02.0431	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya	9.618.061.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.533.763.720
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.426.915.720
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.020.000.000
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	382.600.000
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	134.248.000
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	1.370.000.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	50.000.000
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	100.000.000
5.1.02.03.03.0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	50.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.883.016.524
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	1.724.335.554
5.1.02.03.04.0005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	20.000.000
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	180.000.000
5.1.02.03.04.0014	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	488.187.480
5.1.02.03.04.0015	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	500.000.000
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	410.000.050
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	556.627.940
5.1.02.03.04.0063	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	320.710.000
5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	494.960.000
5.1.02.03.04.0113	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya	100.000.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	88.195.500
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	22.496.731.088
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.247.153.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.764.571.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	89.932.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.392.650.000

KOTA SAWAHLUNTO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	249.578.088
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	249.578.088
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.622.750.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.622.750.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.552.250.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.748.000.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	75.000.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	247.500.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	12.802.476.320
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	12.802.476.320
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	12.802.476.320
5.1.03	Belanja Bunga	1.250.000.000
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	1.250.000.000
5.1.03.01.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	1.250.000.000
5.1.03.01.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	1.250.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	14.897.274.124
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.521.710.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.495.500.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.495.500.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	578.710.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	578.710.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	307.500.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	307.500.000
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	140.000.000
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	140.000.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	8.790.900.000
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	8.790.900.000
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	8.790.900.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	584.664.124
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	584.664.124
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	584.664.124
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.550.645.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.550.645.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	4.550.645.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	4.550.645.000
5.2	BELANJA MODAL	114.637.166.815
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.875.862.224
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	18.867.000

KOTA SAWAHLUNTO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	16.225.000
5.2.02.01.01.0010	Belanja Modal Alat Pengangkat	16.225.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	2.642.000
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	1.386.000
5.2.02.01.03.0014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	1.256.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.829.822.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.479.822.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.695.222.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	100.600.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	84.000.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	600.000.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	350.000.000
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	350.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	141.973.800
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	121.600.000
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	4.600.000
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	117.000.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	3.983.800
5.2.02.03.02.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	3.983.800
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	16.390.000
5.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	5.390.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	11.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	3.550.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	3.550.000
5.2.02.04.01.0003	Belanja Modal Alat Panen	550.000
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	3.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.101.408.680
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	525.266.787
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	2.500.000
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	662.400
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	117.058.816
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	405.045.571
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.516.141.893
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.840.762.403
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	64.298.900
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	239.841.480
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	35.308.200
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	245.630.910
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	90.300.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	60.000.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	60.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	373.995.890
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	103.699.640
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	37.623.750
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	5.500.000

KOTA SAWAHLUNTO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	60.575.890
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	22.762.500
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	7.400.000
5.2.02.06.02.0007	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	15.362.500
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	247.533.750
5.2.02.06.03.0008	Belanja Modal Peralatan Antena VHF/FM	20.000.000
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	156.033.750
5.2.02.06.03.0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	71.500.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.884.260.694
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.726.544.694
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	503.629.090
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	1.107.825.000
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	213.244.740
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	4.147.783
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	314.660.015
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	1.069.558.445
5.2.02.07.01.0020	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	133.982.047
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	379.497.574
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	157.716.000
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	157.716.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	526.009.660
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	512.709.660
5.2.02.08.01.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	1.265.000
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	111.444.660
5.2.02.08.01.0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	400.000.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	13.300.000
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	13.300.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.580.158.500
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	5.113.714.000
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	63.562.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	5.050.152.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	466.444.500
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	254.679.500
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	193.765.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	18.000.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	44.400.000
5.2.02.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi	15.400.000
5.2.02.15.01.0003	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	15.400.000
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	29.000.000
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	29.000.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	13.816.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	13.816.000
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	13.816.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	7.600.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	7.600.000

KOTA SAWAHLUNTO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	7.600.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	350.000.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	350.000.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	350.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.090.561.912
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	30.965.561.912
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	30.965.561.912
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	7.830.000.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.899.250.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	11.362.554.500
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	9.763.757.412
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	50.000.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	60.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	125.000.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	125.000.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	125.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66.566.542.679
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	50.496.318.679
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	47.885.318.679
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	41.284.468.679
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	6.450.850.000
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	150.000.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	2.611.000.000
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	2.611.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	7.848.724.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.605.000.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.605.000.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.035.000.000
5.2.04.02.04.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	2.015.000.000
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	1.020.000.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	550.000.000
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	550.000.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.658.724.000
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	2.108.724.000
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	550.000.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	8.221.500.000
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	7.221.500.000
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	7.221.500.000
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	500.000.000
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	500.000.000
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	500.000.000
5.2.04.03.06.0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	500.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	104.200.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	29.200.000

KOTA SAWAHLUNTO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	29.200.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	15.200.000
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	3.000.000
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	2.000.000
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	3.000.000
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	2.000.000
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	2.000.000
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	2.000.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	75.000.000
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	75.000.000
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	75.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.818.738.600
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.818.738.600
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.818.738.600
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.818.738.600
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	3.818.738.600
5.4	BELANJA TRANSFER	57.408.448.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.239.217.000
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	702.550.000
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	702.550.000
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	702.550.000
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	536.667.000
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	536.667.000
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	536.667.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	56.169.231.000
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	56.169.231.000
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	56.169.231.000
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	56.169.231.000
	Jumlah Belanja	674.249.264.407
	Total Surplus/(Defisit)	(57.134.532.690)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	58.801.199.359
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	46.715.232.575
6.1.01.05	Penghematan Belanja	46.715.232.575
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	46.715.232.575
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	46.715.232.575
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	12.085.966.784
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	12.085.966.784
6.1.05.06.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	12.085.966.784
6.1.05.06.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	12.085.966.784
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	58.801.199.359
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.666.666.669
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.166.666.669
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	1.166.666.669

KOTA SAWAHLUNTO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
6.2.03.01.02	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	1.166.666.669
6.2.03.01.02.0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	1.166.666.669
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000
6.2.04.06	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	500.000.000
6.2.04.06.02	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat	500.000.000
6.2.04.06.02.0001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat	500.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		1.666.666.669
Pembiayaan Netto		57.134.532.690

W Walikota Sawahlunto
DERI ASTA

